



RENJA PERUBAHAN TAHUN **2024**

INSPEKTORAT
Mengawal

@inspektorat.bjn

inspektorat.bojonegorokab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
INSPEKTORAT
Jl. Truno Joyo No 12A Lantai 1 Telp/Fax (0353) 881336
E-mail: inspektorat.bjn@gmail.com
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BOJONEGORO**

NOMOR : 188//KEP/412.100/2024

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024**

INSPEKTUR KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan gambaran Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024;

b. Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tentang Penetapan Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Rencana Kerja (Renja) Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024. |
| KESATU | : | Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, selanjutnya disebut dengan Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024, merupakan dokumen perencanaan untuk tahun anggaran 2024. |
| KEDUA | : | Renja Perubahan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 31 Juli 2024

INSPEKTUR
KABUPATEN BOJONEGORO



TEGUH PRIHANDONO, Ak, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660626 198703 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Perubahan APBD Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Perubahan APBD Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan jangka pendek tahunan yang bersifat indikatif memuat berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat pada Tahun 2024 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Rencana Kerja ini memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan tupoksi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Maka Rancangan Renja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Perubahan APBD Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam kegiatan bidang pengawasan Tahun 2024.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam rencana kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan positif dari semua pihak, sedangkan untuk mencapai tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program, kegiatan dalam renja ini akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan termasuk ketersediaan sumber daya pendukung dalam pelaksanaan kegiatan.

Demikian Rancangan Renja Inspektorat Perubahan APBD Tahun 2024 disusun semoga dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi semua pihak.

Bojonegoro, 31 Juli 2024

**INSPEKTUR**

TEGUH PRIHANDONO, Ak, M.M

Pembina Utama Muda
NIP. 19660626 198703 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA.....	5
BAB II hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	6
2.2 Analisis Kinerja.....	7
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat	9
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	9
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Serta Sinkronisasi Antar OPD25	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	26
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	26
3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat	27
3.2.1 Tujuan	27
3.2.2 Sasaran	27

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	30
4.1 Program dan Kegiatan	30
BAB V PENUTUP	35
LAMPIRAN.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah semakin mendapat sorotan masyarakat. Pemerintah dituntut mampu untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada masyarakat sebagai stakeholders. Dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, Perencanaan Strategis merupakan langkah awal untuk pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis merupakan integrasi atas semua sumber daya yang dimiliki dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan Good Governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya, yaitu: transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Apabila keseimbangan peran dan ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar Good Governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan jangka pendek untuk satu tahun anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2024. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro disusun secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi kegiatan PD sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja PD yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Rencana Kerja merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Kerja instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, regional, nasional maupun global dengan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Perubahan APBD Tahun 2024 mengacu pada RPD Tahun 2024 – 2026 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan skala prioritas, visi, misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Inspektorat.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro didasarkan pada:

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan tentang Pembangunan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005- 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah No.13 Tahun 2016 atas Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro P-APBD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada Renstra Inspektorat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD), memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung dengan Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro P-APBD Tahun 2024 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro P-APBD Tahun 2024. Renja juga merupakan acuan dalam penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan. Dokumen Renja ini juga disusun dengan tujuan sebagai barometer untuk mengukur dan melakukan evaluasi terhadap kinerja tahunan. Selain itu juga bertujuan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA

Sistematika penulisan Renja Perubahan APBD Tahun 2024 disusun ke dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Maksud dan Tujuan. Proses dan Sistematika Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

BAB II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mernuat Kebijakan Inspektorat Tahun 2024 – 2026, Program Utama dan Kegiatan Prioritas Inspektorat

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Program dan Kegiatan Inspektorat beserta pendanaannya.

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan berbagai harapan dan tindak lanjut pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi terhadap jalannya Renstra 2024-2026 dapat dilihat melalui perkembangan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Kabupaten Bojonegoro berdasarkan program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama Renja dan Renstra Tahun 2023

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Kriteria
Tujuan Terwujudnya Efektifitas Pengawasan Tata Kelola Instansi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel					
A	Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan RB	8,95	8,95	89,50%	Berhasil
B	Indeks Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN RB	8,01	8,01	95,53%	Sangat Berhasil

No.	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian	Kriteria
Sasaran I. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah					
1	Nilai SAKIP OPD Min.BB	48 OPD	30 OPD	62,50%	Cukup Berhasil
2	Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	90%	89,43%	99,36%	Sangat Berhasil
Sasaran II. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah					
3	Maturitas SPIP	Level 3 (3,20)	Level 3 (3,205)	100%	Sangat Berhasil
Sasaran III. Meningkatnya Kapabilitas APIP					
4	Level Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%	Sangat Berhasil

Rekapitulasi evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah pada Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disajikan pada lampiran **Tabel TC-29**.

2.2 Analisis Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam menentukan tolok ukur dan indikator kinerja perlu dilakukan analisis pencapaian kinerja. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dinilai berdasarkan Indikator Kinerja. Kinerja utama Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 dituangkan kedalam 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 2 TC-30 Pencapaian Kinerja Inspektorat Kab. Bojonegoro

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	Catatan Analisis Capaian 2023
		2024	2025	2026	2023	2024	
1	2	3	4	5	8	13	14
1	Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan RB	8,25	8,35	8,5	8,01	8,25	<i>Realisasi capaian adalah 89,50% hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik</i>
3	Indeks Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN RB	8,65	8,7	8,8	8,57	8,65	<i>Capaian dapat dikatakan sangat berhasil (Capaian diukur melalui indeks SPI KPKP 2023)</i>
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah min. BB	34 OPD	38 OPD	42 OPD	30 OPD	34 OPD	<i>Kendala dalam capaian kinerja Nilai SAKIP PD adalah kualitas perencanaan yang masih kurang terutama pada kecamatan</i>
5	% Tindak Lanjut Temuan BPK	90	90	90	89,43	90	<i>Capaian dapat dikatakan sangat berhasil dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 (Sumber data: SIPTL BPK-RI)</i>
6	Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,4)	Level 3 (3,205)	Level 3	<i>Target terpenuhi namun terdapat penurunan nilai dibanding tahun 2022</i>
7	Kapabilitas APIP	Level 3(3,3)	Level 3(3,3)	Level 3(3,4)	Level 3 (3,00)	(3,3)	

Sedangkan dari kinerja serapan anggaran, Inspektorat berhasil melakukan serapan sebanyak 86,31% atau sejumlah Rp.12.968.044.053,00 dari total anggaran Rp.15.024.814.045,00.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Berisikan uraian mengenai: 3 perkembangan tingkat kinerja pelayanan Inspektorat, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang. Berdasarkan analisis gambaran pelayanan, kajian hasil evaluasi serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Inspektorat, maka dapat dirumuskan isu - isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat. Perumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bojonegoro berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat. Isu - isu strategis yang dihadapi dilihat dari faktor internal adalah terbatasnya kualitas SDM yang memadai, sedangkan dari faktor eksternal adalah masih lemahnya pengendalian intern dari masing - masing unit kerja.

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Anggaran daerah sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan daerah mengalami perubahan paradigma seiring dengan pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi pada pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah melahirkan paradigma baru tersebut berupa tuntutan kepentingan publik (public oriented).

Perubahan tersebut tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran diperlukan adanya penentuan pagu indikatif untuk membatasi usulan Inspektorat Daerah agar lebih realistis dan terukur, sehingga diperlukan tolok ukur dan analisis yang jelas dengan melihat proporsi terhadap pembiayaan pemeriksaan dan pengawasan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2024 – 2026.

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bojonegoro 2024 serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro 2024 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase JFA/P2UPD yang bersertifikat	100	14.195.875.503	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase JFA/P2UPD yang bersertifikat	100	14.793.404.485	
						Persentase SDM dengan pengembangan profesi 20 JP/ tahun	100			Persentase SDM dengan pengembangan profesi 20 JP/ tahun	100		
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg terbit	100	62.685.000	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg terbit	100	62.685.000	
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16	33.791.690	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	16	33.791.690	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	15.251.885	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	15.251.885	
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	13.641.425	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	13.641.425	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang terbit	100	10.001.613.293	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang terbit	100	9.431.383.606	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54	9.756.963.293	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	54	9.186.733.606	
6	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	241.500.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12	241.500.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	3.150.000	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	3.150.000	
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian	100	604.554.510	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian	100	650.630.400	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	58.275.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	53.370.400	
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	62	546.279.510	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	62	597.260.000	
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum yang disediakan	100	599.007.312	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum yang disediakan	100	710.485.774	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	9.246.064	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4	9.246.064	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	108.566.900	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4	200.348.200	
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	36.717.450	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	36.707.310	
6	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	4	121.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	4	121.388.900	
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	15.477.866	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	15.430.000	
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	36	12.705.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-	36	11.640.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						undangan yang disediakan				undangan yang disediakan			
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4	22.931.382	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	4	22.913.300	
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	272.362.650	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	48	292.812.000	
6	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang disediakan	100	600.383.700	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang disediakan	100	1.828.604.777	
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6	177.975.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	6	1.351.838.254	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	144.728.850	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	1	199.310.723	
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	277.679.850	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	20	277.455.800	
6	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase layanan administrasi yang tersedia	100	512.253.525	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase layanan administrasi yang tersedia	100	577.047.612	
6	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200	7.940.625	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	200	7.940.000	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	199.550.400	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	201.949.980	
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	34	304.762.500	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	34	367.157.632	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang diperbaiki	100	1.815.378.163	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang diperbaiki	100	1.532.567.316	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	420.978.163	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	384.368.400	
6	01	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	12	42.000.000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	12	40.000.000	
6	01	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pealatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	47.250.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pealatan dan mesin lainnya yang dipelihara	24	59.300.000	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	01	2.08	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1.305.150.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1	1.048.898.916	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Meningkatkan Nilai SAKIP	60	1.361.543.428	PROGRAM PENYELENGGA RAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Meningkatkan Nilai SAKIP	60	1.069.663.428	
						Persentase OPD yang menindaklanjuti LHP	90			Persentase OPD yang menindaklanjuti LHP	90		
						Persentase Temuan Berulang	10			Persentase Temuan Berulang	10		
						Persentase Tindak Lanjut Dumas tuntas dan kasus hukum	100			Persentase Tindak Lanjut Dumas tuntas dan kasus hukum	100		
6	01	02	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	80	1.088.227.985	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	80	896.347.985	
						Persentase cakupan PKPT	90			Persentase cakupan PKPT	90		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Persentase LHP terbit tepat waktu dan sesuai standar	100			Persentase LHP terbit tepat waktu dan sesuai standar	100		
						Persentase OPD yang dimonev menindaklanjuti LHP	90			Persentase OPD yang dimonev menindaklanjuti LHP	90		
						Persentase Permintaan APH yang ditindaklanjuti	100			Persentase Permintaan APH yang ditindaklanjuti	100		
6	01	02	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47	305.536.273	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	47	205.536.273	
6	01	02	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	87	358.888.330	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	87	308.888.330	
6	01	02	01	05	Pengawasan Desa (Pengawasan umum teknis kabupaten/kota)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	137.729.320	Pengawasan Desa (Pengawasan umum teknis kabupaten/kota)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	137.729.320	
6	01	02	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan	10	96.176.605	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan	10	96.176.605	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Internal yang Terbentuk				Internal yang Terbentuk			
6	01	02	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	189.897.457	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK- RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	148.017.457	
6	01	02	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase dumas yg ditelaah	100	273.315.443	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase dumas yg ditelaah	100	173.315.443	
						Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standar	100			Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standar	100		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
6	01	02	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	9	75.744.689	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	9	75.744.689	
6	01	02	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	22	197.570.754	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	22	97.570.754	
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Nilai MCP (Area Pengawasan)	90	1.689.324.928	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN ASISTENSI	Nilai MCP (Area Pengawasan)	90	1.705.393.537	
						Persentase OPD ZI yang diusulkan penilai ZI Kemenpan sesuai kuota	100			Persentase OPD ZI yang diusulkan penilai ZI Kemenpan sesuai kuota	100		
						Persentase OPD min. MRI Level 2	37			Persentase OPD min. MRI Level 2	37		
						Persentase ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang	100			Persentase ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang	100		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						relevan dengan leveling				relevan dengan leveling			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase SOP sesuai Proses Bisnis	100	54.521.998	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase SOP sesuai Proses Bisnis	100	54.521.998	
						Persentase PKPT Berbasis Risiko sesuai dengan pedoman dan leveling	100			Persentase PKPT Berbasis Risiko sesuai dengan pedoman dan leveling	100		
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	40	54.521.998	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	40	54.521.998	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD dengan peningkatan Nilai SAKIP	49	1.634.802.930	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD dengan peningkatan Nilai SAKIP	49	1.650.871.539	
						Survey Kualitas Layanan	3,44			Survey Kualitas Layanan	3,44		
						Persentase tertib pelaporan LHASN	100%			Persentase tertib pelaporan LHASN	100%		

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Persentase tertib pelaporan gratifikasi	95%			Persentase tertib pelaporan gratifikasi	95%		
						Persentase OPD tuntas TL Renaksi MCP	90%			Persentase OPD tuntas TL Renaksi MCP	90%		
						Persentase OPD ZI Self Assesment memenuhi ambang WBK/WBM	80%			Persentase OPD ZI Self Assesment memenuhi ambang WBK/WBM	80%		
						Persentase OPD menindaklanjuti hasil Manajemen Risiko	40%			Persentase OPD menindaklanjuti hasil Manajemen Risiko	40%		
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20	810.847.133	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	20	766.588.042	
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	8	559.139.904	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	8	549.139.904	

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan				Hasis Analisis Kebutuhan				Catatan
					Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
						Reformasi Birokrasi				Reformasi Birokrasi			
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30	264.815.893	Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30	335.143.593	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Serta Sinkronisasi Antar OPD

Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tidak secara khusus melaksanakan penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Namun dalam pelaksanaan audit reguler pada Kecamatan beserta Desa, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menelaah kegiatan yang dilaksanakan masyarakat dengan membandingkan antara proposal masyarakat yang disetujui dengan hasil pelaksanaan kegiatannya.

Tabel 2. 4 Usulan dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatn
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Tabel 2. 5 Tabel Kegiatan Sinkornisasi Program Antara Inspektorat dengan OPD Lain di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	OPD	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, gambaran indikator pembangunan yang perlu menjadi perhatian antara lain:

1. Rasio gini
2. Pertumbuhan investasi
3. Share industri pengolahan
4. Tingkat inflasi
5. Tingkat kemiskinan
6. Tingkat pengangguran terbuka
7. Insiden tuberkolosis
8. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan Tinggi
9. Kontribusi PDB industri pengolahan
10. Nilai devisa pariwisata
11. Rasio kewirausahaan nasional
12. Indeks pembangunan kebudayaan
13. Indeks kerukunan umat beragama
14. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
15. Porsi EBT dalam bauran energi nasional
16. Prevalensi stunting pada balita
17. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) membaca, (b) matematika, (c) sains

Dalam menjawab indikator pembangunan nasional, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro menyusun kebijakan mendorong prioritas program dan kegiatan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Oleh karena itu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang mengacu pada Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta didasarkan kebutuhan pengawasan daerah dan register risiko untuk menentukan prioritas pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat

3.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang dapat menggambarkan hasil akhir yang dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan target kualitatif yang dalam penetapannya mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan (performance indicator). Tujuan dapat menggambarkan arah strategi dan perbaikan yang ingin dicapai kedepan untuk mempertajam fokus pelaksanaan misi, meletakkan kerangka prioritas dalam memfokuskan arah semua program dan kegiatan. Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi, Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dibutuhkan tujuan yakni **“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Tata Kelola Instansi Pemerintah yang bersih dan akuntabel”**.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang dimaksud disini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan penjabaran dari tujuan. Penetapan sasaran didasari atas isu-isu strategis, analisis lingkungan internal dan eksternal untuk menentukan faktor kunci keberhasilan, sejalan

dengan proses perencanaan strategis. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi dana dan sumber daya kedalam kegiatan atau operasional untuk pencapaian kinerja yang diinginkan. Dalam penetapan sasaran juga dirancang dan diidentifikasi indikator pencapaiannya, yaitu suatu ukuran tingkat keberhasilan perwujudan pencapaiannya pada periode tahun tertentu.

Setiap indikator pencapaian sasaran disertai dengan targetnya masing-masing. Adapun sasaran yang dapat diidentifikasi untuk diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu 2024-2026 sebagaimana dinyatakan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan sasaran yang dapat diidentifikasi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Indikator Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kab. Bojonegoro Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
A	Tujuan: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Tata Kelola Instansi Pemerintah yang bersih dan akuntabel	Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan RB	8,25
		Indeks Pemerintahan Bersih dan Bebas KKN RB	8,65
1	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan perangkat Daerah	Nilai SAKIP atas OPD minimal BB	34 OPD
		Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	90
2	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Indikator Tahun 2024
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Level 3 (3,3)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan organisasi kebijakan organisasi tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk program. Sedangkan Kegiatan merupakan tindakan nyata Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis organisasi dan tertuang dalam Rencana Kerja Program Tahunan (RKT) Tahun 2024. Adapun program dan kegiatan terangkum dalam uraian sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini merupakan program yang mendukung pelayanan umum di instansi yang bersifat rutin perkantoran untuk mendukung sasaran yakni meningkatnya sarana prasarana penunjang fungsi pengawasan dan peningkatan profesionalitas kapasitas sumber daya aparatur pengawas. Program ini direalisasikan dengan kegiatan-kegiatan, yang meliputi:

a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini diwujudkan dengan penyusunan perencanaan, program dan laporan-laporan di lingkup kegiatan pengawasan dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, jasa layanan pengelola administrasi keuangan berupa pembayaran honorarium pengelola keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan Pengetahuan dan kompetensi SDM Aparatur Pengawas atau APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) dengan sub kegiatan :
- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Kegiatan ini merupakan penyediaan kebutuhan administrasi umum perkantoran dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
 - Penyediaan Bahan / Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dengan sub kegiatan:

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya
- f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Kegiatan ini merupakan penyediaan jasa surat menyurat, komunikasi, sumber daya air dan listrik serta jasa pelayanan umum perkantoran dengan sub kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini merupakan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka mendukung fungsi pengawasan, dengan sub kegiatan :

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan Meubel

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini dituangkan untuk mendukung sasaran yakni meningkatnya intensitas pengawasan. Dalam program peningkatan sistem pengawasan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal

Adalah kegiatan yang secara berkala dimana merupakan kegiatan pengawasan/pemeriksaan yang dilaksanakan secara rutin, berkala terhadap sejumlah satuan kerja atau unit kerja dan untuk memantau hasil pengawasan yang merupakan bagian dari sistem pengawasan sehingga pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien serta tuntas, dengan sub kegiatan sebagai berikut:

- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Pengawasan Umum Teknis Kabupaten / Kota
- Kerjasama Pengawasan Internal
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Merupakan kegiatan yang dilakukan apabila terdapat aduan masyarakat atau suatu kasus tertentu sehingga diperlukan penanganan berupa pemeriksaan kasus/ bersifat khusus, dengan sub kegiatan :

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini dituangkan untuk mendukung sasaran yakni meningkatnya intensitas pengawasan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Adalah merupakan kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan sub kegiatan :

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Merupakan kegiatan pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah, penilaian reformasi birokrasi, serta verifikasi pencegahan korupsi dan penegakan integritas dengan sub kegiatan :

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan verifikasi Penegakan Integritas

Rekapitulasi indikasi program dan kegiatan yang meliputi : jumlah program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan sumber pendanaan sebagaimana tertuang dalam lampiran **Tabel T-C.33**.

BAB V

PENUTUP

Untuk menjamin agar kegiatan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka sebuah sistem perencanaan yang baik merupakan syarat mutlak untuk tercapainya tujuan. Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang menggambarkan prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro dan dijabarkan dalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Adapun prioritas pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bojonegoro adalah berdasarkan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran - sasaran pembangunan.
- 2) Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya.
- 3) Kegiatan tersebut sifatnya mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan.
- 4) Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun.

Renja tahun 2024 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) yang selanjutnya menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah. Beberapa harapan dengan adanya Renja 2024, sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi sesuai dengan tujuan dan sasaran berikut berbagai Indikator yang telah ditetapkan.

- 2) Mampu memberikan arahan bagi pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
- 3) Mengakomodasikan berbagai aspirasi, perkembangan maupun perubahan yang terjadi yang belum terprediksi dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 – 2026.

Selain itu dukungan maupun political will dari pemerintah daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan pemerintah daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Bojonegoro pada umumnya.

Dalam mengevaluasi, setiap tahun Inspektorat akan menyusun tindak lanjut atas kekurangan / kelemahan atas perencanaan renja seperti: mengadakan pertemuan internal yang melibatkan pihak stakeholder di lingkungan Inspektorat, melakukan identifikasi dan inventarisasi kendala dan hambatan serta melakukan pengembangan / inovasi program kegiatan yang mengacu pada aspek kebutuhan dan urgensi perencanaan daerah. Akhirnya, indikator keberhasilan pelaksanaan Renja akan sangat tergantung kepada komitmen dan konsistensi para pelaksana program dan kegiatan sehingga sasaran organisasi yang telah ditetapkan bersama dapat dicapai dengan sebaik-baiknya.

31 Juli 2024



TEGUH PRIHANDONO, Ak, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19660626 198703 1 001

LAMPIRAN

Tabel T-C.29.
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket	
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 ÷ 8		11 = 10/5x100%		12	13	
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K
																							Inspektorat	
																							Inspektorat	
	6	01				Tujuan : Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Tata Kelola Instansi Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel																Inspektorat		
							Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan RB	8.95 Indeks					8.11 Indeks				8.11 Indeks		90.61 %					
							Indeks Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN RB	8.7 Indeks					8.60 Indeks				8.60 Indeks		98.85 %					
	6	01	02			Sasaran : Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah																Inspektorat		
							Maturitas SPIP	3 Level SPIP		3 Level SPIP			3 Level SPIP				3 Level SPIP		100 %					
1	6	01	02						3,023,181,047		1,506,979,863				796,219,510				2,303,199,373		76.18 %	Inspektorat		
							Prosentase temuan berulang	10 %					10 %				10 %		100 %					
							Prosentase tindak lanjut dumas	100 %		100 %			100 %				100 %		100 %					
							Prosentase OPD yang menindaklanjuti LHP	90 %		87 %			87 %				87 %		96.67 %					
							Prosentase tindak lanjut evaluasi kinerja OPD	80 %		87 %			87 %				87 %		108.75 %					
	6	01	02	2.01					2,453,182,124.5		1,216,173,763				668,532,510				1,884,706,273		76.83 %	Inspektorat		
							% LHP terbit tepat waktu dan sesuai standar	100 %		100 %			100 %				100 %		100 %					
							jumlah OPD SPIP lv. 3	11 OPD																
							% OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	100 %		6 %			60 %				60 %		60.00 %					
							Jumlah OPD dengan peningkatan Nilai SAKIP	50 %		48 %			48 %				96 %		192.00 %					
							% temuan berulang	10 %					10 %				10 %		100 %					
							survey kualitas layanan	3.5		3.13			3.13				3.13		89.43 %					
							% OPD yang menindaklanjuti LHP	100 %		87 %			87 %				87 %		87.00 %					
							% Cakupan PKPT	100 %		100 %			68 %				68 %		68.00 %					
	6	01	02	2.01	01				579,744,045.5		242,150,800				198,377,300				440,528,100		75.99 %	Inspektorat		
								102		55			85				140		137.25 %					
	6	01	02	2.01	02				490,988,409		142,009,200				248,060,500				390,069,700		79.45 %	Inspektorat		
								122		35			85				120		98.36 %					
	6	01	02	2.01	03				206,710,600		173,295,300							173,295,300		83.83 %	Inspektorat			
								34		31							31		91.18 %					

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket		
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	6	01	02	2.01	04				133,138,800		121,405,500							121,405,500		91.19 %	Inspektorat		
								22		22								22		100 %			
	6	01	02	2.01	05				308,595,081.5		204,966,500			123,574,000				328,540,500		106.46 %	Inspektorat		
								128		76			37					113		88.28 %			
	6	01	02	2.01	06				279,580,267.5		133,501,863			51,378,582				184,880,445		66.13 %	Inspektorat		
								21		10			5					15		71.43 %			
	6	01	02	2.01	07				454,424,921		198,844,600			47,142,128				245,986,728		54.13 %	Inspektorat		
								84		36			34					70		83.33 %			
	6	01	02	2.02					569,998,922.5		290,806,100			127,687,000				418,493,100		73.42 %	Inspektorat		
							% dumas yg diterbitkan LHP	100 %		100 %			100 %					100 %		100 %			
							% dumas yg ditelaah	100 %		100 %			100 %					100 %		100 %			
							%permintaan APH yg ditindaklanjuti	100 %		100 %			100 %					100 %		100 %			
	6	01	02	2.02	01				197,349,699.5		113,248,000			42,577,000				155,825,000		78.96 %	Inspektorat		
								24		16			9					25		104.17 %			
	6	01	02	2.02	02				372,649,223		177,558,100			85,110,000				262,668,100		70.49 %	Inspektorat		
								39		23			16					39		100 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																0 %	Infinity %			93.52 %	76.18 %		
	6	01	03			Sasaran : Meningkatkan Kapabilitas Apip															Inspektorat		
						Level Kapabilitas APIP	4 Level		262 Level			262 Level					262 Level		6550.00 %				
2	6	01	03						3,339,062,113		1,548,045,428			1,021,446,430				2,569,491,858		76.95 %	Inspektorat		
						Prosentase OPD yang meningkat nilai SAKIP	79 %		48 %			48 %					48 %		60.76 %				
						Nilai MCP	95		95			90					90		94.74 %				
						Prosedur ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang relevan dengan leveling	100 %		100 %			100 %					100 %		100 %				
	6	01	03	2.01					100,175,462		18,363,900			21,039,500				39,403,400		39.33 %	Inspektorat		
						% tertib pelaporan gratifikasi	100 %		98.65 %			98 %					98 %		98.00 %				
						% tertib pelaporan LHASN	100 %		99.81 %			100 %					100 %		100 %				
	6	01	03	2.01	01				84,874,612		12,293,500			21,039,500				33,333,000		39.27 %	Inspektorat		
							96		77			37					114		118.75 %				
	6	01	03	2.01	02				15,300,850		6,070,400							6,070,400		39.67 %	Inspektorat		
							72		78								78		108.33 %				
	6	01	03	2.02					3,238,886,651		1,529,681,528			1,000,406,930				2,530,088,458		78.12 %	Inspektorat		
						% OPD tuntas TL Renaksi MCP	95 %		94.63 %			90 %					90 %		94.74 %				
						Jumlah OPD melaksanakan pembangunan ZI	3					3					3		100 %				
	6	01	03	2.02	01				1,530,042,145		679,982,228			617,332,330				1,297,314,558		84.79 %	Inspektorat		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
								30		18				17				35		116.67 %			
	6	01	03	2.02	02				879,218,894		334,073,500				319,218,100				653,291,600		74.30 %	Inspektorat	
								40		25				15				40		100 %			
	6	01	03	2.02	03				480,603,012		205,611,800				63,856,500				269,468,300		56.07 %	Inspektorat	
								21		13				8				21		100 %			
	6	01	03	2.02	04				349,022,600		310,014,000								310,014,000		88.82 %	Inspektorat	
								11		11								11		100 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																0 %	Infinity %			103.65 %	76.95 %		
																						Inspektorat	
																						Inspektorat	
	X	XX	01			Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah																Inspektorat	
						Nilai SAKIP OPD Minimal BB	30 OPD			26 OPD				29 OPD				29 OPD		96.67 %			
						Persentase Tindak Lanjut Temuan BPK	90 %			87 %				90 %				90 %		100 %			
3	X	XX	01						31,644,642,977		16,383,484,176				11,150,348,113				27,533,832,289		87.01 %	Inspektorat	
						Persentase JFA/P2UPD yang bersertifikat	100 %			100 %				100 %				100 %		100 %			
						Nilai SAKIP Inspektorat	83 Nilai SAKIP							83 Nilai SAKIP				83 Nilai SAKIP		100 %			
						Persentase SDM dengan pengembangan profesi 20 JP/ tahun	100 %			100 %				100 %				100 %		100 %			
	X	XX	01	2.01					133,200,000		102,165,150				22,902,500				125,067,650		93.89 %	Inspektorat	
						Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg terbit	100 %			1 %				100 %				100 %		100 %			
	X	XX	01	2.01	01				84,323,163		38,333,500				12,850,500				51,184,000		60.70 %	Inspektorat	
								48		32				16				48		100 %			
	X	XX	01	2.01	06				25,398,504.5		9,039,350				7,522,000				16,561,350		65.21 %	Inspektorat	
								9		6				3				9		100 %			
	X	XX	01	2.01	07				23,478,332.5		54,792,300				2,530,000				57,322,300		244.15 %	Inspektorat	
								3		3				1				4		133.33 %			
	X	XX	01	2.02					24,157,559,404		11,852,847,580				7,238,500,431				19,091,348,011		79.03 %	Inspektorat	
						Prosentase dokumen administrasi keuangan yang terbit	100 %			100 %				100 %				100 %		100 %			
	X	XX	01	2.02	01				23,095,597,304		11,110,558,425				7,019,256,431				18,129,814,856		78.50 %	Inspektorat	
								1944		1296				648				1944		100 %			
	X	XX	01	2.02	02				1,053,849,100		737,667,155				217,002,000				954,669,155		90.59 %	Inspektorat	
								36		24				12				36		100 %			
	X	XX	01	2.02	05				8,113,000		4,622,000				2,242,000				6,864,000		84.60 %	Inspektorat	
								6		4				2				6		100 %			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
	X	XX	01	2.05				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
									1,272,918,200		699,267,962				608,435,235				1,307,703,197		102.73 %	Inspektorat	
							Presentase administrasi kepegawaian	100 %		100 %				100 %				100 %		100 %			
	X	XX	01	2.05	02				101,800,000		53,745,000				48,214,000				101,959,000		100.16 %	Inspektorat	
								3		2				1				3		100 %			
	X	XX	01	2.05	09				1,171,118,200		645,522.962				560,221,235				1,205,744,197		102.96 %	Inspektorat	
								138		86				57				143		103.62 %			
	X	XX	01	2.06					1,431,410,121		890,053,130				489,716,761				1,379,769,891		96.39 %	Inspektorat	
							Persentase pelayanan umum yang disediakan	100 %		100 %				99.79 %				99.79 %		99.79 %			
	X	XX	01	2.06	01				23,360,775		13,485,350				8,232,000				21,717,350		92.97 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	02				306,515,848		226,507,000				53,620,000				280,127,000		91.39 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	03				92,591,000		37,600,500				18,747,000				56,347,500		60.86 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	04				450,484,232		275,163,225				118,319,760				393,482,985		87.35 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	05				39,105,825		23,834,000				13,758,000				37,592,000		96.13 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	06				32,100,000		12,495,600				6,360,000				18,855,600		58.74 %	Inspektorat	
								138		82				46				128		92.75 %			
	X	XX	01	2.06	07				57,904,441		35,092,555				12,791,600				47,884,155		82.70 %	Inspektorat	
								12		8				4				12		100 %			
	X	XX	01	2.06	09				429,348,000		265,874,900				257,888,401				523,763,301		121.99 %	Inspektorat	
								226		178				118				296		130.97 %			
	X	XX	01	2.07					1,317,518,969		1,103,916,380				862,940,110				1,966,856,490		149.28 %	Inspektorat	
							Presentase BMD / Sarpras yang disediakan	100 %		100 %				100 %				100 %		100 %			
	X	XX	01	2.07	02				283,340,530		103,325,000				505,542,410				608,867,410		214.89 %	Inspektorat	
								10		3				7				10		100 %			
	X	XX	01	2.07	05				109,915,000		39,945,000				132,722,700				172,667,700		157.09 %	Inspektorat	
								3		3				1				4		133.33 %			
	X	XX	01	2.07	06				729,263,439		638,624,370				224,675,000				863,299,370		118.38 %	Inspektorat	
								35		15				10				25		71.43 %			
	X	XX	01	2.07	09				195,000,000		322,022,010								322,022,010		165.14 %	Inspektorat	
								1		1								1		100 %			
	X	XX	01	2.08					854,960,500		286,823,983				428,801,332				715,625,315		83.70 %	Inspektorat	
							Presentase layanan administrasi yang tersedia	100 %		90 %				92.53 %				92.53 %		92.53 %			

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja RPJMD pada Tahun 2023 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2022		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun berjalan yg dievaluasi (tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang Dievaluasi (tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Ket
1	2					3	4	5		6		7		8		9 = 8/7 x 100%		10 = 6 + 8		11 = 10/5x100%		12	13
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	X	XX	01	2.08	01				17,062,500		1,918,150				555,500				2,473,650		14.50 %	Inspektorat	
								750		415				194				609		81.20 %			
	X	XX	01	2.08	02				487,648,000		259,905,833				138,949,008				398,854,841		81.79 %	Inspektorat	
								36		24				12				36		100 %			
	X	XX	01	2.08	04				350,250,000		25,000,000				289,296,824				314,296,824		89.73 %	Inspektorat	
								90		26				34				60		66.67 %			
	X	XX	01	2.09					2,477,075,783		1,448,409,991				1,499,051,744				2,947,461,735		118.99 %	Inspektorat	
							Presentase BMD / Sarpras yang diperbaiki	100 %		95 %				94.41 %				94.41 %		94.41 %			
	X	XX	01	2.09	02				1,008,275,783		574,201,099				355,301,286				929,502,385		92.19 %	Inspektorat	
								87		51				30				81		93.10 %			
	X	XX	01	2.09	05				120,000,000		72,400,000				14,275,000				86,675,000		72.23 %	Inspektorat	
								140		86				11				97		69.29 %			
	X	XX	01	2.09	06				105,800,000		55,485,200				26,005,000				81,490,200		77.02 %	Inspektorat	
								124		71				46				117		94.35 %			
	X	XX	01	2.09	09				1,243,000,000		746,323,692				1,103,470,458				1,849,794,150		148.82 %	Inspektorat	
								3		2				1				3		100 %			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM																0 %	Infinity %			98.73 %	87.01 %		
JUMLAH TOTAL									38,006,886,137		19,438,509,467		0		12,968,014,053				32,406,523,520				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																0 %	Infinity %			98.63 %	85.26 %		

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO

SKPD : INSPEKTORAT

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH			REALISASI CAPAIAN	PROYEKSI	Catatan Analisis
		2024	2025	2026	2023	2025	
1	2	3	4	5	8	13	14
1	Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan RB	8,25	8,35	8,5	8,01	8,25	Realisasi capaian adalah 89,50% hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja yang baik
3	Indeks Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN RB	8,65	8,7	8,8	8,57	8,65	Capaian dapat dikatakan sangat berhasil (Capaian diukur melalui indeks SPI KPKP 2023)
4	Nilai SAKIP Perangkat Daerah min. BB	34 OPD	38 OPD	42 OPD	30 OPD	34 OPD	Kendala dalam capaian kinerja Nilai SAKIP PD adalah kualitas perencanaan yang masih kurang terutama pada kecamatan
5	% Tindak Lanjut Temuan BPK	90	90	90	89,43	90	Capaian dapat dikatakan sangat berhasil dan mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 (Sumber data: SIPTL BPK-RI)
6	Maturitas SPIP	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,3)	Level 3 (3,4)	Level 3 (3,205)	Level 3 (3,3)	Target terpenuhi namun terdapat penurunan nilai dibanding tahun 2022
7	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3 (3,3)	

Tabel T-C 33
RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024
KABUPATEN BOJONEGORO

SKPD : INSPEKTORAT

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase JFA/P2UPD yang bersertifikat	Bojonegoro	100	14.793.404.485	APBD Kab. Bojonegoro		100	14.317.990.242
						Persentase SDM dengan pengembangan profesi 20 JP/ tahun	Bojonegoro	100				100	
6	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja yg terbit	Bojonegoro	100	62.685.000	APBD Kab. Bojonegoro		100	65.819.250
6	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Bojonegoro	16	33.791.690	APBD Kab. Bojonegoro		16	35.481.275
6	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Bojonegoro	3	15.251.885	APBD Kab. Bojonegoro		3	16.014.479
6	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bojonegoro	1	13.641.425	APBD Kab. Bojonegoro		1	14.323.496
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi keuangan yang terbit	Bojonegoro	100	9.431.383.606	APBD Kab. Bojonegoro		100	10.189.094.875
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bojonegoro	54	9.186.733.606	APBD Kab. Bojonegoro		54	9.932.212.375
6	01	01	2.02	02	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasill penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bojonegoro	12	241.500.000	APBD Kab. Bojonegoro		12	253.575.000
6	01	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinansi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bojonegoro	2	3.150.000	APBD Kab. Bojonegoro		2	3.307.500
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian	Bojonegoro	100	650.630.400	APBD Kab. Bojonegoro		100	633.830.190
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Bojonegoro	1	53.370.400	APBD Kab. Bojonegoro		1	60.519.690

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Bojonegoro	62	597.260.000	APBD Kab. Bojonegoro		62	573.310.500
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan umum yang disediakan	Bojonegoro	100	710.485.774	APBD Kab. Bojonegoro		100	627.658.788
6	01	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Bojonegoro	4	9.246.064	APBD Kab. Bojonegoro		4	9.708.367
6	01	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bojonegoro	4	200.348.200	APBD Kab. Bojonegoro		4	113.539.335
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Bojonegoro	4	36.707.310	APBD Kab. Bojonegoro		4	38.542.676
6	01	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket logistik kantor yang disediakan	Bojonegoro	4	121.388.900	APBD Kab. Bojonegoro		4	127.458.345
6	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Bojonegoro	4	15.430.000	APBD Kab. Bojonegoro		4	16.201.500
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Bojonegoro	36	11.640.000	APBD Kab. Bojonegoro		36	12.222.000
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	Bojonegoro	4	22.913.300	APBD Kab. Bojonegoro		4	24.058.965
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Bojonegoro	48	292.812.000	APBD Kab. Bojonegoro		48	285.927.600
6	01	01	2.07		Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang disediakan	Bojonegoro	100	1.828.604.777	APBD Kab. Bojonegoro		100	611.218.965
6	01	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Bojonegoro	6	1.351.838.254	APBD Kab. Bojonegoro		6	167.992.650
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Bojonegoro	1	199.310.723	APBD Kab. Bojonegoro		1	151.897.725
6	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Bojonegoro	20	277.455.800	APBD Kab. Bojonegoro		20	291.328.590
6	01	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Presentase layanan administrasi yang tersedia	Bojonegoro	100	577.047.612	APBD Kab. Bojonegoro		100	552.402.493
6	01	01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bojonegoro	200	7.940.000	APBD Kab. Bojonegoro		200	8.337.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12
6	01	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bojonegoro	12	201.949.980	APBD Kab. Bojonegoro		12	212.047.479
6	01	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jasa laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Bojonegoro	34	367.157.632	APBD Kab. Bojonegoro		34	332.018.014
6	01	01	2.08		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Presentase BMD / Sarpras yang diperbaiki	Bojonegoro	100	1.532.567.316	APBD Kab. Bojonegoro		100	1.637.965.682
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bojonegoro	24	384.368.400	APBD Kab. Bojonegoro		24	441.964.320
6	01	01	2.08	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Bojonegoro	12	40.000.000	APBD Kab. Bojonegoro		12	42.000.000
6	01	01	2.08	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah pealatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Bojonegoro	24	59.300.000	APBD Kab. Bojonegoro		24	52.657.500
6	01	01	2.08	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Bojonegoro	1	1.048.898.916	APBD Kab. Bojonegoro		1	1.101.343.862
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang Meningkatkan Nilai SAKIP	Bojonegoro	60	1.069.663.428	APBD Kab. Bojonegoro		65	1.543.146.599
						Persentase OPD yang menindaklanjuti LHP	Bojonegoro	90				90	
						Persentase Temuan Berulang	Bojonegoro	10				9	
						Persentase Tindal Lanjut Dumas tuntas dan kasus hukum	Bojonegoro	100				100	
6	01	02	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase OPD yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi SAKIP	Bojonegoro	80	896.347.985	APBD Kab. Bojonegoro		90	1.256.165.384
						Persentase cakupan PKPT	Bojonegoro	90				90	
						Persentase LHP terbit tepat waktu dan sesuai standar	Bojonegoro	100				100	
						Persentase OPD yang dimonev menindaklanjuti LHP	Bojonegoro	90				90	
						Persentase Permintaan APH yang ditindaklanjuti	Bojonegoro	100				100	
6	01	02	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bojonegoro	47	205.536.273	APBD Kab. Bojonegoro		47	320.813.087
6	01	02	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bojonegoro	87	308.888.330	APBD Kab. Bojonegoro		87	376.832.747

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	12
6	01	02	01	05	Pengawasan Desa (Pengawasan umum teknis kabupaten/kota)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Bojonegoro	52	137.729.320	APBD Kab. Bojonegoro		52	144.615.786
6	01	02	01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Bojonegoro	10	96.176.605	APBD Kab. Bojonegoro		10	100.985.435
6	01	02	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bojonegoro	5	148.017.457	APBD Kab. Bojonegoro		5	312.918.330
6	01	02	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase dumas yg ditelaah	Bojonegoro	100	173.315.443	APBD Kab. Bojonegoro		100	286.981.215
						Persentase Laporan Hasil Audit Investigasi yang terbit tepat waktu dan sesuai standar	Bojonegoro	100				100	
6	01	02	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Bojonegoro	9	75.744.689	APBD Kab. Bojonegoro		9	79.531.923
6	01	02	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Bojonegoro	22	97.570.754	APBD Kab. Bojonegoro		22	207.449.292
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN, DAN	Nilai MCP (Area Pengawasan)	Bojonegoro	60	1.705.393.537	APBD Kab. Bojonegoro		95	1.935.345.129
						Persentase OPD ZI yang diusulkan penilai ZI Kemenpan sesuai kuota	Bojonegoro	95				100	
						Persentase OPD min. MRI Level 2	Bojonegoro	100				38	
						Persentase ketersediaan kebijakan prosedur pengawasan yang relevan dengan leveling	Bojonegoro	37		APBD Kab. Bojonegoro		100	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase SOP sesuai Proses Bisnis	Bojonegoro	100	54.521.998	APBD Kab. Bojonegoro		100	57.248.098
						Persentase PKPT Berbasis Risiko sesuai dengan pedoman dan leveling	Bojonegoro	100				100	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	Bojonegoro	40	54.521.998	APBD Kab. Bojonegoro		40	57.248.098
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD dengan peningkatan Nilai SAKIP	Bojonegoro	49	1.650.871.539	APBD Kab. Bojonegoro			1.878.097.031
						Survey Kualitas Layanan	Bojonegoro	3,44				3,52	

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	12
							Persentase tertib pelaporan LHASN	Bojonegoro	100				100%	
							Persentase tertib pelaporan gratifikasi	Bojonegoro	95				95%	
							Persentase OPD tuntas TL Renaksi MCP	Bojonegoro	90				90%	
							Persentase OPD ZI Self Assesment memenuhi ambang WBK/WBM	Bojonegoro	80				80%	
							Persentase OPD menindaklanjuti hasil Manajemen Risiko	Bojonegoro	40				45%	
6	01	03	2.02	01		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bojonegoro	20	766.588.042	APBD Kab. Bojonegoro		20	857.417.444
6	01	03	2.02	02		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bojonegoro	30	549.139.904	APBD Kab. Bojonegoro		30	629.096.899
6	01	03	2.02	03		Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bojonegoro	20	335.143.593	APBD Kab. Bojonegoro		20	391.582.688
										17.568.461.450				17.796.481.970



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
I N S P E K T O R A T
Jl. Pahlawan No. 09 Telp (0353) 881336
Email : inspektorat.bjn@gmail.com
BOJONEGORO

KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 34 /KEP/412.100/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Tahun 2011) Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembar Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- 13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Inspektur Kabupaten Bojonegoro tentang Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
- KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan Data dan Informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Renja;
 - b. Menyusun Rancangan Awal Renja Tahun 2024
 - c. Menyempurnakan Rancangan Renja Tahun 2024 berdasar Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - d. Menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah;
 - e. Menyusun Rancangan Renja Tahun 2024;
 - f. Menyusun Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 untuk ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bojonegoro;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Inspektur Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : Januari 2023

INSPEKTUR
KABUPATEN BOJONEGORO



TEGUH PRIHANDONO, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660626 198703 1 001

Tembusan:

Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Kepala BAPPEDA
Kabupaten Bojonegoro

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bojonegoro
Nomor :188/ 34 /KEP/412.100/2023
Tanggal : Januari 2023

TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam kedinasan
1.	Pengarah	Inspektur Kabupaten Bojonegoro
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Analis Kebijakan Ahli Muda Inspektorat Kabupaten Bojonegoro
4	Anggota	a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; d. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pengawas Reformasi Birokrasi; e. Kasubag. Umum dan Kepegawaian; f. Sub Koordinator Analis Anggaran Ahli Muda Inspektorat; g. Auditor Madya h. Auditor Muda i. Pelaksana di lingkup Sekretariat

INSPEKTUR
KABUPATEN BOJONEGORO



TEGUH PRIHANDONO, Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660626 198703 1 001